

ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT KOTA BITUNG

Julin Mamonto¹, Een N. Walewangko², Mauna Th.B. Maramis³

Program Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email; julinmamonto@yahoo.com, eenwalewangko@unsrat.ac.id, maunamaramis@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Besaran Anggaran Program Pengawasan terhadap Kinerja Inspektorat Kota Bitung.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data besaran Anggaran Program Pengawasan Pada Inspektorat Kota Bitung dengan periode pengamatan sepuluh tahun yaitu tahun 2012-2021. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian asosiatif dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Data diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH) (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung. Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung. Besaran anggaran program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (X3) tidak berpengaruh terhadap kinerja. Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH) (X1), Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (X2), Besaran anggaran program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (X3), berpengaruh secara signifikan terhadap Y.

Kata Kunci: Besaran Anggaran, Pengawasan, Kinerja

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the Budget Amount of the Supervision Program on the Performance of the Bitung City Inspectorate.

This study uses secondary data in the form of budget data for the Supervision Program at the Bitung City Inspectorate with an observation period of ten years, namely 2012-2021. The type of research used is associative research with multiple linear regression data analysis techniques. The data was obtained from the Regional Finance and Assets Agency.

The results of the study indicate that the budget amount for the improvement of the internal monitoring system and controlling the implementation of regional head policies program (Mayor) (X1) has a positive and significant effect on the performance of the Bitung City Inspectorate. The budget amount for Professionalism improvement program of Audit Personnel and Supervisory Apparatuses (X2) has a positive and significant effect on the performance of the Bitung City Inspectorate. The budget amount for the program of the arrangement and improvement of system policies and supervision procedures (X3) has a negative effect on performance. The budget amount for the improvement of the internal monitoring system and controlling the implementation of regional head policies program (Mayor) (X1), The budget amount for Professionalism improvement program of Audit Personnel and Supervisory Apparatuses (X2), The budget amount for the program of the arrangement and improvement of system policies and supervision procedures (X3) have significant effect on Y.

Keywords: Budget Amount, Supervision, Performance

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu: pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2004:208). Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang baik, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan

mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. *Lord Action* dalam Tri Widodo (2008) menyatakan, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*).

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 218 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan: (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara lebih teknis dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya pengawasan sebagai salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Pengawasan internal tidak hanya dilakukan pada saat akhir proses manajemen saja, tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Pergeseran peran pengawasan internal yang telah meluas dari sekedar *watch dog* (menemukan penyimpangan) ke posisi yang lebih luas, yaitu sebagai konsultan dan katalis yang berorientasi pada efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan ke arah pemberian nilai tambah yang optimal.

Otonomi Daerah yang disemangati dengan azas desentralisasi maka mandat untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Kota Bitung sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pengawasan ada pada Inspektorat, dengan demikian Inspektorat Kota Bitung memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem Pemerintahan daerah Kota Bitung. Untuk itu efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat memiliki peran yang sangat signifikan bagi keberhasilan Pemerintahan Daerah Kota Bitung.

Kota Bitung berdasarkan UU No. 7 Tahun 1990 Tanggal 15 Agustus 1990, ditetapkan sebagai daerah otonomi yang baru. Inspektorat Kota Bitung mempunyai peran besar dalam tujuan mewujudkan *good governance and clean government* pada Pemerintah Kota Bitung. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena terdapat berbagai permasalahan yang ada dan sering mengemuka, baik dari dalam institusi Inspektorat secara khusus maupun Pemerintah Daerah Kota Bitung secara umum. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain, masih cukup tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, permasalahan yang berulang diantaranya mengenai pengelolaan belanja modal, pengelolaan belanja barang dan jasa, pengelolaan belanja bantuan dan hibah, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan pengelolaan aset tetap. Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian negara bahkan tidak sedikit Aparat Sipil Negera (ASN) pada Pemerintah Daerah Kota Bitung berhadapan dengan kasus hukum bahkan berujung pada tuntutan pidana yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah, masih sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih rendahnya komitmen dan kerjasama dari pimpinan PD dalam menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan, serta masih terbatasnya anggaran dan prasarana serta kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan jika dibandingkan dengan jumlah dan luasnya obyek pemeriksaan.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting bagi Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintahan, dalam menjalankan perannya sebagai fungsi pengawasan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran Negara merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Berbeda dengan anggaran pada sektor swasta di mana anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, anggaran negara justru harus diinformasikan kepada publik. Penganggaran dalam sektor publik harus memperhatikan segi keefektifan, keefisienan dan keekonomian sehingga perencanaan anggaran pada akhirnya tidak menggagalkan rencana yang telah disusun. Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

Anggaran sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan maka anggaran dapat menjadi indikator kinerja organisasi. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuannya yang tentu saja akan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik seperti sumber daya manusia maupun non fisik seperti peraturan, informasi, dan kebijakan, maka harus lebih memahami mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi sebuah kinerja organisasi.

Kinerja pegawai merupakan tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam kurun waktu tertentu. Kinerja pegawai juga merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi.

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Inspektorat Daerah merupakan pilar yang bertugas sebagai “pengawas” sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengawasan internal bertujuan menilai system pengendalian manajemen, efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja. Berikut ini adalah rincian anggaran program pengawasan Inspektorat Kota Bitung tahun 2012-2022:

Tabel 1. BESARAN ANGGARAN PROGRAM PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA BITUNG TAHUN 2012-2021

Program	Tahun									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH)	755,890,000	736,402,660	676,301,051	432,234,749	402,978,068	1,019,199,400	1,203,981,438	1,914,832,200	978,918,177	1,159,133,425
Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	29,650,000	18,200,000.00	15,230,000	213,126,000	137,820,981	179,046,900	176,068,697	554,199,200	356,205,448	356,205,448
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	2,500,000	188,110,000	147,292,500	185,352,000	147,644,481	91,018,200	121,371,783	100,553,090	100,553,090	149,999,000

Sumber: Inspektorat Kota Bitung

Berdasarkan data yang telah diperoleh maka dapat dilihat bahwa adanya penurunan anggaran pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Penurunan tersebut Dampak dari Pandemi Covid-19 Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan Daerah yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah Inspektorat Kota Bitung masih terkendala dari segi anggaran pengawasan Hal ini mengakibatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan tidak optimal.

Pengawasan merupakan kegiatan pengendalian internal yang sangat penting karena itu harus dioptimalkan *kinerja APiP agar pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dapat tercapai*. Penelitian Yanida (2013) tentang Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah menemukan bahwa semakin besar tingkat partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran, maka kinerja pegawai juga akan meningkat. Penelitian lain yaitu Sembiring (2017) tentang Pengaruh Insentif dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur melalui Pemberian insentif dan peningkatan disiplin diharapkan berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur yang secara tidak langsung meningkatkan kinerja dinas. Namun dalam penelitian Wiratno (2016) tentang Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi menemukan bahwa anggaran tidak mempengaruhi kinerja. Melihat urgensinya besaran anggaran program pengawasan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan ini perlu untuk dianalisis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Inspektorat Kota Bitung”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH) berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung?

2. Apakah Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung?
3. Apakah Besaran Anggaran Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung?
4. Apakah Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH), Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH) terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung
2. Untuk mengetahui pengaruh Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung
3. Untuk mengetahui pengaruh Besaran Anggaran Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung?
4. Untuk mengetahui pengaruh Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH), Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, serta Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara simultan terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Organisasi Publik

Bastian (2014:359), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan penskemaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Serta, menurut Mardiasmo dalam Kusumawardani (2012) bahwa kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik lebih baik. Kinerja dapat berarti sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan, dan; kemampuan kerja (tentang peralatan) (Bastian, 2014:G-3). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

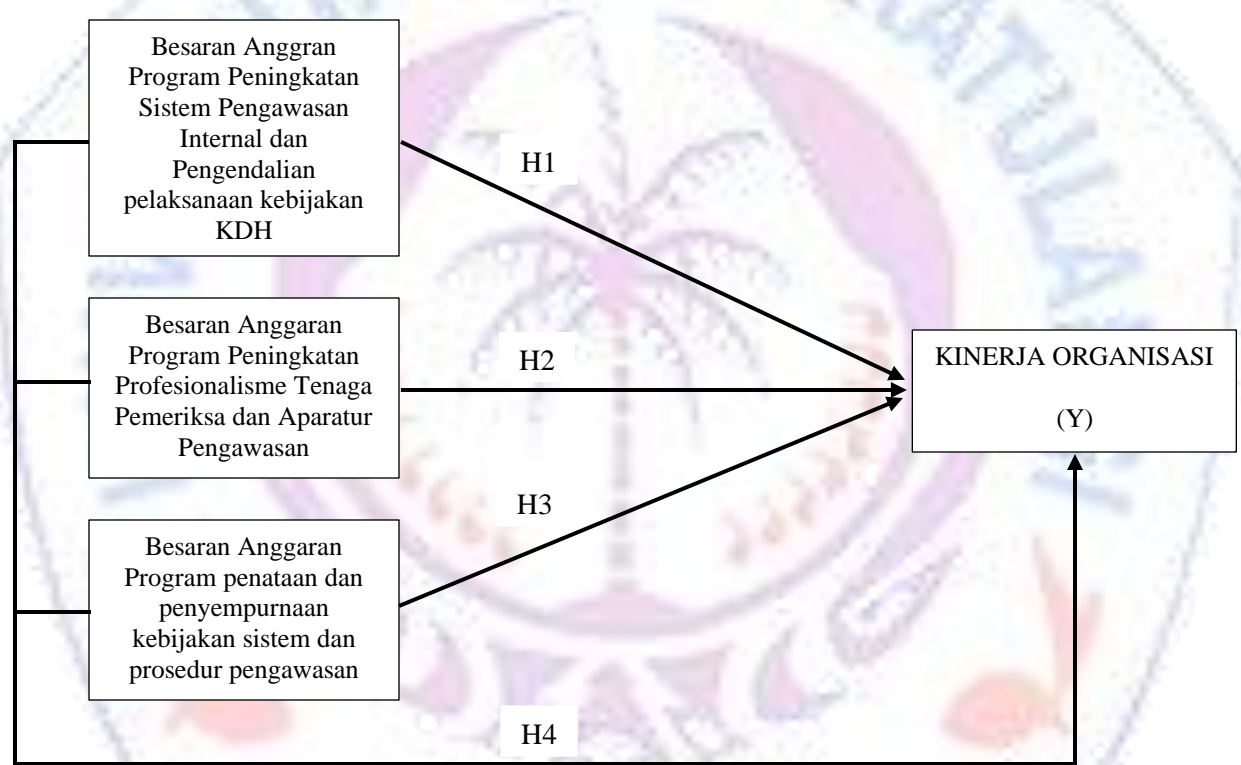
Pengawasan

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Reksohadiprodjo (2008) pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sumarsono, 2010). Pengawasan sebagai upaya control birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena “Apabila tidak dilaksanakan cepat

atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya organisasi atau birokrasi itu sendiri” (Terry, 2007:137).

Anggaran

Pendapat Kaho (1997:60) bahwa salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan sangat menentukan penyelenggaraan otonomi daerah, selain Sumber Daya Manusia dan Kemampuan aparatur adalah Keuangan yang stabil dan peralatan yang lengkap. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi meliputi sumber daya finansial, fisik, SDM, dan kemampuan teknologis dan sistem (Simamora, 2004). Karena sumber-sumber yang dimiliki perusahaan bersifat terbatas, sehingga organisasi atau perusahaan dituntut mampu memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Dari keterangan itu, maka faktor ketersediaan anggaran (*Financial*) menjadi suatu hal yang penting dalam meningkatkan kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan dan meningkatkan profesionalisme hasil kerja.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesa Penelitian

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang belum diketahui kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung
2. Diduga Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung
3. Diduga Besaran Anggaran Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung
4. Diduga Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan serta Besaran Anggaran Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi, dalam pengertian bisnis, data merupakan sekumpulan informasi dalam pengambilan keputusan (Kuncoro, 2009). Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016:402), sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder terkait APBD Kota Bitung dan Besaran Anggaran Realisasi Pengawasan Inspektorat Kota Bitung dalam kurun waktu 10 tahun sejak 2012 sampai dengan tahun 2021 di peroleh melalui Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan tentang buku/artikel program ataupun kebijakan pemerintah, buku/artikel tentang ilmu pemerintahan serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu melalui Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel, dan berbagai publikasi.

Metode Analisis

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menaksir bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya positif atau negatif.

Berdasarkan model dasar pada persamaan $Y = f(X_1, X_2, X_3)$ maka ditemukan model estimasi $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

Dimana:

Y	=	Kinerja Organisasi
β_0	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien Regresi X_1, X_2, X_3
X_1	=	Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH)
X_2	=	Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
X_3	=	Besaran Anggaran Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
E	=	Error

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis
Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/20/22 Time: 05:47
Sample: 2012 2021
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	107.8792	35.76051	3.016715	0.0235
X1	1.25E-07	3.25E-08	3.835046	0.0086
X2	2.70E-07	7.89E-08	3.419237	0.0142
X3	-2.53E-07	1.76E-07	-1.440317	0.1998
R-squared	0.955105	Mean dependent var	247.3000	
Adjusted R-squared	0.932657	S.D. dependent var	101.5798	
S.E. of regression	26.36053	Akaike info criterion	9.670787	
Sum squared resid	4169.264	Schwarz criterion	9.791821	
Log likelihood	-44.35393	Hannan-Quinn criter.	9.538013	
F-statistic	42.54796	Durbin-Watson stat	1.922759	
Prob(F-statistic)	0.000195			

Sumber : Olah Data Eviews 10,2020

Dari tabel di atas dapat dituliskan model persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X1 + \beta_2X2 + \beta_3X3+e$$

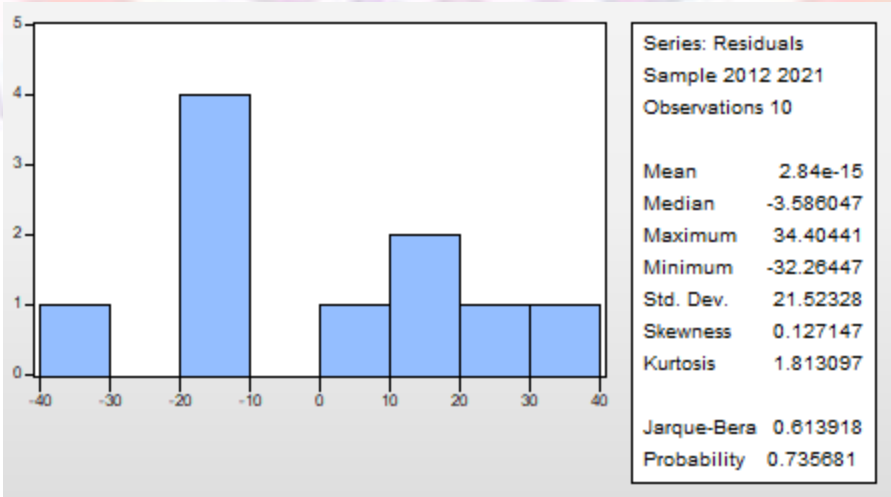
Dimana :

$$Y = 107.8792 + 1.25E - 07X1 + 2.70E - 07X2 - 2.53E - 07X3+e$$

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model rergresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-keduanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan jargue-bera test.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas



Sumber : Olah Data Eviews 10,2020

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (0.735681) > α (0.05) maka H₀ diterima. Karena H₀ diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antarvariabelbebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung korelasi cukup kuat di antara variabel bebas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.748451	-0.286634
X2	0.748451	1.000000	-0.035732
X3	-0.286634	-0.035732	1.000000

Sumber : Olah Data Eviews 10,2020

Berdasarkan tabel uji multikolinieritas di atas, semua nilai koefisien korelasi < 0.8, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antarvariabel independen atau dengan kata lain asumsi nonmultikolinieritas terpenuhi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS				
Method: Least Squares				
Date: 11/20/22 Time: 05:53				
Sample: 2012 2021				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.36929	15.41136	1.711029	0.1379
X1	-2.02E-09	1.40E-08	-0.143802	0.8904
X2	-9.15E-09	3.40E-08	-0.268920	0.7970
X3	-3.57E-08	7.58E-08	-0.471483	0.6540
R-squared	0.085570	Mean dependent var	18.22761	
Adjusted R-squared	-0.371646	S.D. dependent var	9.699973	
S.E. of regression	11.36034	Akaike info criterion	7.987309	
Sum squared resid	774.3445	Schwarz criterion	8.108343	
Log likelihood	-35.93654	Hannan-Quinn criter.	7.854535	
F-statistic	0.187154	Durbin-Watson stat	1.633629	
Prob(F-statistic)	0.901390			

Berdasarkan tabel uji glejser diperoleh probabilitas X_1 (0.8904) > α (0.05), maka H_0 diterima, probabilitas X_2 (0.7970) > α (0.05), maka H_0 diterima dan probabilitas X_3 (0.6540) > α (0.05), maka H_0 diterima. Karena H_0 untuk variable independen X_1 , X_2 , X_3 diterima berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel independen. X_1 , X_2 dan X_3 .

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Uji autokorelasi ini menggunakan nilai durbin-watson dalam tabel regresi berganda untuk melihat masalah autokorelasi dalam model. Berdasarkan nilai durbin-watson pada tabel regresi berganda yaitu:

Nilai Durbin Watson berdasarkan table regresi berganda : 1.922759

dU= 2.0163 (berdasarkan table durbin Watson n=10,k=3)

dL= 0.5253 (berdasarkan table durbin Watson n=10,k=3)

4- dU= 1.9837 , 4- dL=3.4747

Nilai Dw berada di antar dL dan dU yaitu $dL(0.5253) < d(1.922759) < dU(2.0613)$

Uji autokorelasi berada di daerah keragu-raguan/tidak ada keputusan

Uji Signifikan

Uji Parsial (t)

Berdasarkan tabel regresi berganda , nilai uji t-statistik diperoleh $(X_1) (0.0086) < \alpha (0.05)$, maka H_0 ditolak. Karena H_0 ditolak dapat disimpulkan bahwa X_1 berpengaruh secara signifikan terhadap Y.

Nilai probabilitas t-statistik $X_2 (0.0142) < \alpha (0.05)$, maka H_0 ditolak. Karena H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa X_2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y..

Nilai probabilitas t-statistik $X_3 (0.1998) > \alpha (0.05)$, maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa X_3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y.

Uji Simultan (F)

Berdasarkan tabel output regresi berganda, dapat diketahui bahwa nilai uji F-statistik diperoleh prob $(0.000195) < \alpha (0.05)$, maka H_0 ditolak. Berdasarkan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 , X_2 dan X_3 secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Y

Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel output regresi berganda dapat diketahui bahwa nilai *R-square* sebesar 0.955105 artinya secara bersama-sama variabel X_1 , X_2 dan X_3 berpengaruh terhadap Y sebesar 95.5105%, sedangkan sisanya sebesar 4.4895% $(100\% - 95.5105\%)$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam pemodelan ini.

Pembahasan

Berdasarkan persamaan regresi dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

Pengaruh Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH) terhadap Kinerja.

Program Utama dalam pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Kota Bitung adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH). Dimana Program ini pelaksanaannya diarahkan pada upaya-upaya untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja perlu adanya penilaian dengan maksud untuk memberikan satu peluang yang baik kepada pegawai atas rencana karier mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan sehingga dapat menetapkan pemberian tambahan penghasilan dan memberikan promosi. Kinerja juga tidak hanya sekedar informasi untuk dapat dilakukannya promosi atau penetapan tunjangan bagi pegawai, akan tetapi bagaimana memotivasi pegawai dan mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki kemerosotan kinerja dapat dihindari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Artinya perubahan kinerja berupa peningkatan atau penurunan kinerja dipengaruhi oleh besaran anggaran untuk Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH). Hal tersebut di akibatkan oleh karena anggaran tersebut dialokasikan untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yang menyentuh langsung pada tugas pengawasan Inspektorat Kota Bitung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Rahmi Nur Emilia (2013) tentang Pengaruh partisipasi dalam anggaran dan kejelasan sasaran anggaran serta peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Bengkulu. Partisipasi dalam anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah..

Pengaruh Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan terhadap Kinerja.

Suatu organisasi atau Perusahaan jika ingin maju atau berkembang maka harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas memahami peran dan tanggungjawabnya serta mampu menciptakan daya saing yang baik dihadapan pimpinan melalui hasil kerjanya. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang memiliki kinerja baik maka diperlukan penerapan kinerja. Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh organisasi yang bentuknya dapat bersifat tangible (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya) atau intangible (tak dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu. Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu organisasi ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi baik itu berasal dari dalam diri pegawai itu sendiri ataupun yang berasal dari luar individu pegawai itu.

Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan pelaksanaannya diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawas intern pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Artinya perubahan kinerja berupa peningkatan atau penurunan kinerja dipengaruhi oleh besaran anggaran untuk Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Hal tersebut diakibatkan oleh karena anggaran tersebut dialokasikan untuk tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, sehingga dengan anggaran yang dirasakan langsung akan membuat pegawai memiliki kinerja yang lebih tinggi atau mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yurike, Vecky A.J. Masinambow dan Een N. Walewango dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Besaran Anggaran Program Pengawasan Terhadap Kinerja Inspektorat Kota Manado Tahun 2015-2018 yang menunjukkan bahwa besaran anggaran untuk Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja.

Pengaruh Besaran anggaran Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan terhadap Kinerja.

Besaran anggaran Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Program ini diarahkan pada upaya-upaya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu yang pelaksanaannya berdasarkan laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler, laporan masyarakat atau permintaan pimpinan. Program ini juga di arahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan serta kegiatan pendampingan dan asistensi. Kinerja (performance) didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran anggaran Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Artinya perubahan kinerja berupa peningkatan atau penurunan kinerja tidak dipengaruhi oleh besaran anggaran untuk Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Hal tersebut diakibatkan oleh karena anggaran tersebut hanya dialokasikan untuk Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan serta kegiatan pendampingan dan asistensi, sehingga dampaknya tidak bisa langsung dirasakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian N. Ermawati.(2017). Tentang Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja

manajerial dengan motivasi kerja sebagai variabel pemoderasi pada organisasi sektor publik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran anggaran Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja.
4. Secara Simultan Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH), Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Besaran anggaran program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, berpengaruh secara signifikan terhadap Y.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis pada penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Bitung perlu meningkatkan alokasi anggaran pengawasan Inspektorat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH).
2. Guna peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Inspektorat harus terus meningkatkan Sumber Daya Manusia lewat pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).
3. Inspektorat harus mempertahankan dan meningkatkan anggaran untuk Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sehingga akan meningkatkan kinerja.
4. Perlu adanya koordinasi dan dukungan yang baik dari Pemerintah daerah Kota Bitung dengan Inspektorat sebagai organisasi pengawas, serta komitmen pimpinan daerah dan jajarannya untuk menciptakan *good governance* dan *clean government*, sehingga independensi Inspektorat tetap terjaga tanpa adanya intervensi dan Kinerja semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Munandar.2001. Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta UI
Bastian.2001. Akuntansi Sektor Publik
Kaho.1997. Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD
Kuncoro, Mudrajad.2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 3 Penerbit Erlangga.
Mardiasmo.2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
Mardiasmo.2009. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
Munandar.2001. Psikologi Industri Dan Organisasi.

- Rahmi Nur Emilia.2013.** Pengaruh Partisipasi dalam anggaran dan kejelasan sasaran anggaran serta peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Bengkulu.
- Reksohadiprodjo. 2008.** Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE
- Rudi Mantiri.2018.** Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi pegawai dan teknologi informasi terhadap kinerja anggaran pada Universitas Samratulangi.
- Sembiring.2017.** Pengaruh Insentif dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai
- Sugiyono. 2016.** Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT.Alfabeta.
- Wiratno (2016)** tentang Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi
- Yanida. (2013).** Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NBwjNa25vykJ:https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/download/264/251+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Jurnal Jurnal Unibraw.
- Yurike. (2019).** Pengaruh Besaran Anggaran Program Pengawasan Terhadap Kinerja Inspektorat Kota Manado.
- Zahro.(2016).** Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Persepsi Keadilan Anggaran dan Komitmen Tujuan Anggaran Sebagai Variabel. <http://webcache.gogleusercontent.com/search?q=cache:8offsDzEFvsJ:https://media.neliti.com/media/publications/74146-ID-pengaruh-pertisipasi-anggaran-terhadap-k.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Jurnal Undip.